COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA DI KOTA MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

Cannavaro Regyna Sakti
NPP. 33.0439
Program Studi Studi Kebijakan Publik
Email: cannavaroregynasakti@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Siti Zulaikha, M. Si
Email: sitizulaka@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *The author focuses on the problem in the administration of the Indonesian One Data Policy in Magelang City, which faces challenges in data integration among Regional Government Organizations (OPD), disparities in sectoral data availability, and suboptimal coordination among stakeholders, indicating that data governance has not yet been fully effective despite being supported by a strong regulatory framework.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the collaborative governance process in the administration of the Indonesian One Data Policy in Magelang City and to identify its supporting and inhibiting factors.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach with a post-positivist paradigm adopting the Collaborative Governance Regimes framework. Data collection techniques were conducted through semi-structured interviews, observation, and documentation, and the data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman supported by NVivo software.* ***Result:*** *This study found that collaborative governance has been established but is not yet optimal. The main weaknesses lie in the principled engagement aspect, which lacks intensive interaction, and in the capacity for joint action, which is constrained by limited human resources and technical capacity. Supporting factors include regulatory support, the institutional role of the data custodian, digital infrastructure, data standardization, and trust among stakeholders. In contrast, the inhibiting factors include disparities in sectoral data, limited human resources, and bureaucratic dynamics.* ***Conclusion:*** *This study concludes that collaborative governance in the administration of the Indonesian One Data Policy in Magelang City has been established but has not run optimally. It is recommended that institutional capacity be strengthened, cross-actor coordination be enhanced, and collective commitment be fostered to optimize data governance.*

Keywords: *Collaborative Governance; Data Governance; Data Integration; Indonesian One Data Policy; Local Government*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penulis berfokus pada permasalahan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang yang masih menghadapi tantangan dalam integrasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ketimpangan ketersediaan data

sektoral, serta belum optimalnya koordinasi antar aktor, yang menunjukkan bahwa tata kelola data belum sepenuhnya efektif meskipun didukung oleh kerangka regulasi yang kuat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivism* yang mengacu pada kerangka *Collaborative Governance Regimes*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan dukungan aplikasi NVivo. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* telah berjalan, namun belum optimal. Kelemahan utama terletak pada aspek *principled engagement* yang belum intensif, serta *capacity for joint action* yang masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis. Faktor pendukung meliputi dukungan regulasi, peran kelembagaan wali data, infrastruktur digital, standar data, serta kepercayaan antar aktor. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi ketimpangan data sektoral, keterbatasan sumber daya manusia, dan dinamika birokrasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang telah terbentuk namun belum berjalan secara optimal. Adapun saran penelitian ini yakni perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi lintas aktor, serta komitmen kolektif guna mengoptimalkan tata kelola data.

Kata kunci: *Collaborative Governance*; Integrasi Data; Pemerintah Daerah; Satu Data Indonesia; Tata Kelola Data.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, yang menuntut adaptasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di era Society 5.0 (Budijaya & Situmeang, 2025). Penguatan tata kelola pemerintahan digital di Indonesia diarahkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai strategi untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel (Komarudin dkk., 2025). Istilah pemerintahan digital atau *e-government* ini telah menjadi sinonim dengan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah untuk mempercepat proses roda pemerintahan, merestrukturisasi tata laksana, dan meningkatkan pemberian layanan publik kepada masyarakat (Hendiyani & Fansuri, 2024). Keberhasilan transformasi pemerintahan digital ini bertumpu pada pemanfaatan data sebagai dasar perumusan kebijakan, yang menuntut adanya tata kelola data yang mampu menjamin standar dan interoperabilitas lintas lembaga (Husna, 2025). Pelaksanaan tata kelola data tersebut pada dasarnya mengacu pada perwujudan otoritas dan kendali penuh atas manajemen data (Abraham et al., 2019). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan nilai aset data, mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis bukti, serta meminimalkan risiko operasional (Ramadhan, Tajudeen, & Jaafar, 2024).

Kebutuhan akan data yang andal dan terstandar dijawab melalui kebijakan Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dengan tujuan mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses (Adinegoro dkk., 2025). Pemerintah Kota Magelang menindaklanjuti arah kebijakan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 serta mengembangkan Portal DataGo sebagai wadah integrasi dan penyediaan data sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Evaluasi berkala terhadap tingkat kematangan teknologi informasi di daerah menjadi instrumen penting untuk memetakan capaian

kemajuan dan menyelaraskan arsitektur data daerah dengan peta jalan pemerintah pusat (Hidayah & Almadani, 2022). Nilai indeks SPBE Kota Magelang memang mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, namun posisi Kota Magelang masih berada di peringkat bawah di antara kota-kota lain di Jawa Tengah. Capaian nilai indeks secara administratif makro tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas integrasi perencanaan penganggaran yang terpadu dan kolaborasi fungsional yang bebas dari masalah tumpang tindih (*overlapping*) fungsi, fitur, maupun data sektoral antar unit organisasi pelaksana (Hendiyani & Fansuri, 2024). Keterbatasan kolaborasi fungsional ini tidak terlepas dari struktur kelembagaan perangkat daerah yang masih diatur secara kaku (*rule-driven organization*) tanpa mengindahkan fleksibilitas kebutuhan riil di daerah (Wasistiono & Rohmadin, 2023).

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan dan kelengkapan data sektoral pada Portal DataGo belum merata. Terdapat disparitas di mana sebagian OPD telah rutin menyediakan data, sementara instansi lain masih terbatas atau belum menyediakan data krusial sama sekali, seperti data realisasi APBD dari BKD maupun data infrastruktur dari DPUPR. Masalah tata kelola data pada lembaga publik secara empiris sering kali masih diganggu oleh kendala penataan data *stewardship*, buruknya koordinasi lintas unit, serta keterbatasan kompetensi teknis dan pemahaman sumber daya manusia mengenai standardisasi data (Ramadhan et al., 2024). Rendahnya pemenuhan bukti dukung yang representatif pada aspek-aspek penting seperti audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan teknologi informasi juga kerap menjadi kelemahan mendasar yang menurunkan kualitas penerapan sistem data terintegrasi (Hidayah & Almadani, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi tata kelola data belum sepenuhnya optimal pada level organisasi pelaksana di daerah.

Penyelenggaraan tata kelola data di Kota Magelang perlu dianalisis melalui perspektif kolaborasi mengingat peningkatan indeks SPBE yang terjadi belum sejalan dengan kelengkapan data sektoral dan kualitas koordinasi antar aktor. Implementasi portal data memerlukan sinergi yang kuat, sehingga konsep *collaborative governance* menjadi sangat relevan untuk menilai mekanisme kolaborasi, pembagian peran, dan hubungan antar instansi pemerintah daerah dalam tata kelola data (Emerson & Nabatchi, 2015). Keberhasilan tata kelola dalam menghasilkan kinerja inovasi kebijakan di dalam lingkungan kelembagaan yang kompleks tidak dapat hanya bertumpu pada otoritas formal semata, melainkan sangat dibentuk oleh fleksibilitas tata kelola kolaboratif dan kapasitas kepemimpinan transformasional dalam mengorkestrasi pengetahuan serta memberdayakan entitas lokal (Zaenuddin & Tibrani, 2026). Dialog yang deliberatif, pembangunan kepercayaan, dan komitmen bersama antaraktor menjadi variabel penentu agar forum kemitraan lintas sektor mampu bergerak adaptif mengurai hambatan ego sektoral birokrasi (Ansell & Gash, 2008). Terdapat urgensi yang besar untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia secara mendalam, khususnya dalam melihat hubungan antar instansi pada pengelolaan data sektoral melalui Portal DataGo Kota Magelang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Penulis berfokus pada permasalahan masih tingginya fragmentasi data, ketimpangan ketersediaan data sektoral antar OPD, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi di Kota Magelang, sementara itu implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi agenda prioritas pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Beberapa permasalahan nyata mengemuka berkaitan dengan pengelolaan data sektoral di portal DataGo Kota Magelang. Salah satu masalah utamanya adalah masih kuatnya ego sektoral di kalangan OPD, di mana sebagian instansi merasa data yang dihasilkan merupakan kewenangan eksklusif mereka dan belum sepenuhnya terbuka dalam berbagi data. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun indeks SPBE Kota Magelang meningkat dari 3,36 pada tahun 2023 menjadi 3,69 pada tahun 2024, ketersediaan data sama sekali tidak merata. Sebagai contoh, instansi strategis seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum mempublikasikan data realisasi belanja dan pendapatan daerah, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang belum menyediakan data infrastruktur esensial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa capaian indeks secara administratif makro belum berbanding lurus dengan komitmen nyata unit pelaksana di lapangan dalam menyediakan data terpadu.

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan belum setaranya mekanisme koordinasi menjadi akar permasalahan lanjutan yang menghambat integrasi data. Banyak OPD tidak memiliki tenaga dengan kompetensi khusus di bidang statistik maupun teknologi informasi, sehingga proses pembaruan dan standardisasi metadata menjadi sangat terhambat. Interaksi yang terjalin dalam Forum Satu Data sering kali masih bersifat satu arah dan sangat didominasi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) selaku wali data, sehingga prinsip keterlibatan yang berprinsip (*principled engagement*) belum sepenuhnya terbangun secara partisipatif dan dialogis antar aktor.

Kajian terdahulu secara umum telah banyak membahas implementasi *e-government* dan kebijakan Satu Data Indonesia, namun sebagian besar hanya berfokus pada kesiapan infrastruktur atau tinjauan kebijakan secara normatif. Kesenjangan penelitian (*research gap*) terlihat pada sangat terbatasnya studi yang secara spesifik membedah dinamika kolaborasi lintas instansi menggunakan kerangka *Collaborative Governance Regimes* dari Emerson dan Nabatchi di tingkat kota skala menengah. Penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana elemen *system context*, faktor pendorong, dan dinamika kolaborasi (seperti tingkat kepercayaan dan kapasitas aksi bersama) secara langsung memengaruhi disparitas ketersediaan data sektoral di Kota Magelang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris secara mendalam mengenai dinamika tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) antar instansi dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang. Hal ini krusial sebagai dasar evaluasi dan perumusan strategi bagi Pemerintah Kota Magelang, khususnya untuk mengatasi tantangan struktural dan kultural seperti kuatnya ego sektoral, disparitas ketersediaan data pada Portal DataGo, serta ketimpangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat OPD. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan kekurangan landasan empiris yang objektif dalam memetakan letak hambatan koordinasi dan relasi timbal balik antar aktor. Akibatnya, strategi penyelesaian masalah integrasi data berisiko hanya bersifat normatif, tidak tepat sasaran, dan gagal mengurai hambatan mendasar di lapangan. Pada akhirnya, upaya mewujudkan pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan berbasis bukti (*evidence-based policy*) melalui kebijakan Satu Data Indonesia berpotensi berjalan kurang optimal dan mengalami stagnasi di tengah tingginya tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji efektivitas kolaborasi lintas aktor dan implementasi digitalisasi pemerintahan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai *collaborative governance* dan tata kelola data memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Setiyawan, Yusrina, dan Mubarokah mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan teori (Ansell & Gash, 2008), yang berfokus pada efektivitas koordinasi lintas instansi pemerintah daerah sebagai objek penelitian (Setiyawan dkk., 2025). Saepudin, Solehatunnisa, Lestari, Gunawan, dan Fadilah mengulas kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung transparansi menggunakan metode kualitatif *literature review* dengan pendekatan *open data* dan *evidence-based policy*, yang berfokus pada konsistensi standar data dan interoperabilitas sistem informasi pemerintah sebagai objek kajian (Saepudin dkk., 2025). Yulianto meneliti pola tata kelola kolaboratif pada Program Gandeng Gendong (GaGe) di Kota Yogyakarta menggunakan metode kualitatif deskriptif penelitian lapangan serta pendekatan kombinasi model 5K, yang berfokus pada skema kemitraan lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan sebagai objek penelitian (Yulianto, 2025). Sumanti membahas strategi pencegahan stunting di Indonesia menggunakan metode kualitatif *literature review* dengan pendekatan teori *Penta Helix* dan *collaborative governance*, yang berfokus pada sinergi multi-aktor untuk percepatan penurunan prevalensi stunting sebagai objek analisis (Sumanti, 2024). Ahad dan Barsei mengkaji praktik terbaik kolaborasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan tata kelola pemerintahan digital, yang berfokus pada integrasi kebijakan dan komitmen pimpinan daerah di kawasan Indonesia Timur sebagai objek kajian (Ahad & Barsei, 2023). Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif, baik melalui studi kasus lapangan maupun tinjauan pustaka, dengan beragam pendekatan teoretis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan fokus kajian dan lokus kebijakan masing-masing.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana penelitian ini merupakan kajian baru dari segi konteks objek penelitian yang berfokus pada implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di pemerintah daerah skala menengah (Kota Magelang) dengan membedah secara spesifik fenomena disparitas pemenuhan data sektoral riil antar OPD pada Portal DataGo. Karakteristik objek ini membedakan penelitian penulis dengan studi (Yulianto, 2025) yang mengangkat isu kemiskinan, (Sumanti, 2024) pada isu stunting, maupun (Ahad & Barsei, 2023) yang meneliti kebijakan SPBE secara makro di Indonesia Timur. Selain itu, pendekatan metodologis yang digunakan juga berbeda karena menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivism* yang diperkuat secara digital melalui pemanfaatan perangkat lunak NVivo 12 untuk pengkodean tematik, visualisasi *project map*, serta analisis *word cloud* terhadap data primer dan sekunder secara interaktif, berbeda dengan studi (Saepudin et al., 2025) dan (Sumanti, 2024) yang mengandalkan metode tinjauan pustaka (*literature review*). Landasan teoretis, indikator, dan pengukuran yang digunakan peneliti pun menunjukkan kebaruan ilmiah yang jelas; ketika penelitian sejenis seperti (Setiyawan dkk., 2025), (Ahad & Barsei, 2023), serta (Sumanti, 2024) dominan menggunakan model kolaborasi klasik Ansell dan Gash (2008), penelitian ini menerapkan kerangka konseptual *Collaborative Governance Regimes* (CGR) dari (Emerson & Nabatchi, 2015) untuk menganalisis kebijakan Satu Data Indonesia di daerah sebagai ekosistem adaptif melalui empat

dimensi komprehensif, yaitu *system context*, *drivers*, *collaborative dynamics*, dan *collaborative governance regimes*.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai proses *collaborative governance* dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma *post-positivism*. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis fenomena sosial serta dinamika interaksi antar aktor dalam tata kelola data secara sistematis tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel (Ardieansyah, 2023). Melalui paradigma *post-positivism*, peneliti menelusuri makna tindakan sosial, pola interaksi, serta konteks kebijakan lintas sektor berdasarkan kerangka *Collaborative Governance Regimes* guna menemukan pemahaman yang komprehensif melalui prosedur yang sistematis.

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan kunci dan utama dari unsur birokrasi yang memiliki keterlibatan langsung, relevansi peran, serta pengetahuan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang. Informan tersebut meliputi perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) Kota Magelang selaku wali data yang memfasilitasi sistem, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) selaku produsen sekaligus pengguna utama data perencanaan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang sebagai pembina data statistik. Teknik *snowball sampling* diterapkan untuk menjaring informan tambahan dari pihak nonpemerintah, yaitu mahasiswi Universitas Negeri Tidar selaku pengguna aktif data publik pada portal DataGo Kota Magelang. Kombinasi seluruh informan ini dipilih agar peneliti memperoleh gambaran yang utuh dan berimbang dari sisi regulator, koordinator, pelaksana, hingga penerima manfaat data.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan melalui kombinasi kegiatan observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen hukum maupun laporan publikasi resmi. Pengujian keabsahan data kualitatif dalam riset ini mengandalkan pendekatan triangulasi metode, sumber, dan teori untuk memastikan tingkat akurasi serta kredibilitas temuan penelitian. Proses verifikasi keabsahan dilakukan secara terus-menerus dengan membandingkan dan menyelaraskan hasil transkrip wawancara, catatan amatan saat menghadiri kegiatan Forum Satu Data, penelaahan dokumen regulasi, serta pemantauan data digital secara langsung pada portal DataGo Kota Magelang demi meminimalkan bias analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model interaktif dari Miles dan Huberman yang berlangsung secara simultan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Simangunsong, 2016). Seluruh data kualitatif yang telah

dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12 untuk mempermudah pelaksanaan *coding* dan kategorisasi tematik berdasarkan dimensi teori Emerson dan Nabatchi. Aplikasi bantu ini dimanfaatkan secara optimal untuk menganalisis hubungan antar-tema (*relationship mapping*) serta menghasilkan visualisasi data berupa *project map* dan *word cloud* sehingga penafsiran kesimpulan akhir mengenai dinamika kolaborasi menjadi lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lokus penelitian ini dilaksanakan di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan memfokuskan amatan pada instansi-instansi kunci yang menjadi pilar penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam bersama para informan ahli dari Diskominsta, Bapperida, BPS, serta kelompok akademisi dilaksanakan secara intensif pada bulan Januari 2026. Rangkaian keseluruhan tahapan riset ini berjalan secara bertahap sesuai linimasa kalender akademik yang direncanakan sejak proses pengajuan judul, seminar usulan penelitian, hingga penyusunan draf final skripsi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Madiun menggunakan pandangan dari Sutedi yang menyatakan bahwa optimalisasi pendapatan daerah dapat diukur melalui lima dimensi, yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan meminimalkan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Pembahasan dari masing-masing dimensi dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. *System Context* (Konteks Sistem)

Pengukuran terhadap dimensi *system context* dalam kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang dilakukan melalui indikator kerangka hukum dan kebijakan serta kondisi sosial, politik, dan kelembagaan. Hasil analisis data menggunakan aplikasi NVivo 12 menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan penyesuaian regulasi di tingkat daerah menjadi fokus yang paling banyak memengaruhi ekosistem kolaborasi ini.

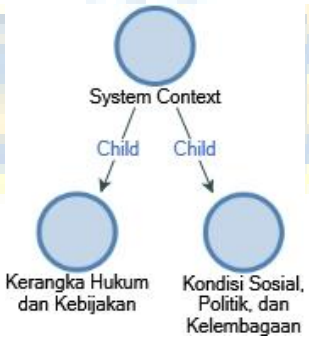

Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026.

Gambar 1.1
Project Map* Dimensi *System Context

Penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang telah didukung oleh kerangka hukum normatif yang kuat dan lengkap, baik di tingkat nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, maupun di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Struktur organisasi formal juga telah terbagi secara jelas, di mana Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominsta) ditetapkan sebagai wali data, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen data.

Realitas empiris di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan struktur formal tersebut belum sepenuhnya menjamin kepatuhan (*compliance*) yang merata pada tingkat pelaksana. Hasil wawancara menunjukkan masih adanya ketimpangan komitmen antar-OPD dalam menyediakan dan memperbarui data secara berkala. Data pada rapor triwulan 3 tahun 2025 di Portal DataGo membuktikan bahwa dari total 82 produsen data, terdapat instansi yang belum optimal dalam pengisian dan publikasi data sektoralnya, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang yang belum melengkapi data realisasi belanja, pembiayaan, dan pendapatan daerah. Fenomena ini dipertegas oleh Ibu Nur Afiyah Maizunati, S.Si., M.Ec.Dev. (Statistisi Ahli Muda Diskominsta) yang menyatakan, "Aturannya sudah ada, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum semua OPD atau produsen data konsisten dalam menginput dan memperbarui data."

Kondisi sosial masyarakat menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan sikap kritis dari warga, akademisi, hingga pelaku usaha terhadap transparansi informasi publik, yang menuntut pemerintah menyediakan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat literasi data masyarakat untuk memanfaatkan portal data secara mandiri di sisi lain masih menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

3.2. *Drivers* (Faktor Pendorong)

Penulis mengukur dimensi *drivers* melalui dua indikator utama, yaitu ketergantungan antar aktor (*interdependence*) serta insentif dan manfaat kolaborasi. Hasil pengolahan kata kunci (*word cloud*) menggunakan NVivo 12 menunjukkan bahwa keberhasilan penggerak kolaborasi ini sangat bergantung pada intensitas hubungan timbal balik antar instansi dalam tahapan perencanaan.

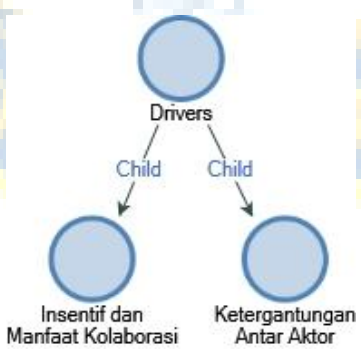

Sumber : Diolah oleh Penulis Menggunakan Nvivo 12, 2026.

Gambar 2.1
Project Map* Dimensi *Drivers

Ketergantungan antar aktor dalam tata kelola data di Kota Magelang bersifat mutlak dan timbal balik. Diskominsta selaku wali data tidak dapat menyajikan informasi pembangunan secara mandiri tanpa adanya pasokan data sektoral dari OPD selaku produsen data. Kebutuhan yang sama juga dirasakan oleh OPD yang sangat bergantung pada infrastruktur teknologi digital dan pengelolaan sistem portal yang difasilitasi oleh Diskominsta. Hubungan ini diperjelas oleh Ibu Nur Afiyah Maizunati yang mengemukakan, "Kami sebagai wali data hanya mengelola dan memfasilitasi, tetapi data itu sendiri berasal dari masing-masing OPD, jadi sangat bergantung pada mereka."

Tingkat kesadaran dan responsivitas aktor di lapangan belum sepenuhnya merata meskipun ketergantungan struktural ini tergolong kuat. Data dalam dokumen Forum Rencana Aksi Satu Data Jawa Tengah menunjukkan persentase proses pengisian *E-Walidata* Kota Magelang berada pada angka 67% dengan tingkat keterisian data sebesar 87,21%. Angka ini mencerminkan sikap kurang responsif dari beberapa instansi produsen data seperti DPUPR, BPKAD, Badan Kesbangpol, dan BKPSDM yang belum melengkapi seluruh variabel dataset sektoralnya pada website DataGo.

Pendorong kolaborasi di Kota Magelang pada aspek insentif lebih didominasi oleh tekanan administratif makro, seperti integrasi penyediaan data ke dalam penilaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan hubungannya dengan peningkatan nilai Indeks SPBE kota. Kolaborasi ini terbukti memberikan manfaat nyata berupa efisiensi birokrasi, pengurangan duplikasi data, dan kemudahan akses lintas sektor untuk penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD). Faktor ketiadaan insentif langsung yang bersifat penghargaan (*reward*) khusus atau dukungan anggaran spesifik bagi admin data di tingkat OPD menyebabkan aktivitas pengelolaan data belum diposisikan sebagai prioritas utama kerja organisasi.

3.3. *Collaborative Dynamics* (Dinamika Kolaborasi)

Dinamika kolaborasi dianalisis melalui tiga elemen interaksi dinamis, yaitu keterlibatan berprinsip (*principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*), serta kapasitas untuk bertindak kolektif (*capacity for joint action*). Analisis NVivo 12 menunjukkan kata kunci "Kepercayaan" dan "Koordinasi" merupakan pilar utama sekaligus titik krusial dalam dimensi ini.

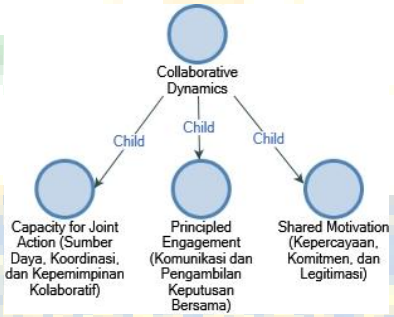

Sumber: Diolah oleh Penulis Menggunakan Nvivo 12, 2026.

Gambar 3.1
Project Map* Dimensi *Collaborative Dynamics

Keterlibatan berprinsip (*principled engagement*) di Kota Magelang telah difasilitasi melalui wadah formal berupa Forum Satu Data Kota Magelang yang diselenggarakan dua kali dalam setahun (pada semester I tanggal 30 Juni 2025 dan semester II tanggal 18 November 2025), serta grup komunikasi informal untuk koordinasi teknis. Kualitas interaksi dan dialog yang terbangun dalam forum tersebut dinilai belum sepenuhnya bersifat deliberatif dua arah karena proses komunikasi masih didominasi oleh pengarahan dari wali data kepada produsen data. Bapak Ari Purwaka, S.ST., M.E.

(Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS Kota Magelang) menyatakan, "Keputusan biasanya dibahas bersama dalam forum, tetapi tetap ada arahan dari wali data sebagai koordinator.Kadang komunikasi lebih banyak dari wali data ke OPD, jadi belum sepenuhnya diskusi dua arah."

Shared motivation antarinstansi menunjukkan indikasi yang bervariasi di lapangan. Kepercayaan dan komitmen formal untuk mendukung keterbukaan data sudah mulai tumbuh, namun perkembangannya masih terhambat oleh ego sektoral dan keraguan psikologis antarinstansi mengenai validitas akurasi data yang diproduksi oleh OPD lain.

Capacity for joint action menjadi titik kelemahan paling mendasar dalam dinamika kolaborasi ini. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai bidang statistik, teknologi informasi, dan pengelolaan metadata dialami oleh hampir sebagian besar OPD, termasuk instansi vertikal atau mitra produsen data yang dirangkul seperti Universitas Tidar, STMIK Bina Patria, dan RS Tentara dr. Soedjono Magelang. Kondisi ini dikonfirmasi oleh Bapak Ari Purwaka yang menegaskan, "Tidak semua OPD memiliki SDM yang memahami pengelolaan data secara teknis, sehingga masih perlu pendampingan dari Diskominsta. Sistem sudah ada, tetapi belum semua OPD siap dari sisi aplikasi dan pengelolaan datanya."

3.4. *Collaborative Governance Regimes* (Rezim Tata Kelola Kolaboratif)

Evaluasi terhadap keberlanjutan bentuk institusional kolaborasi diukur melalui indikator pencapaian tujuan bersama (*shared outcomes*) dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dimensi ini memetakan sejauh mana hasil konkret dari integrasi data sektoral pada Portal DataGo mampu memberikan dampak nyata bagi efisiensi birokrasi serta pemenuhan kebutuhan informasi publik. Hasil analisis menggunakan NVivo 12 pada kompartemen ini menegaskan bahwa keberlanjutan rezim kolaboratif sangat ditentukan oleh aspek kualitas, kemudahan, dan kelengkapan data pembangunan yang disajikan secara konsisten.



Sumber : Diolah Oleh Penulis Menggunakan NVivo 12, 2026.

Gambar 4.1
Project Map* Dimensi *Collaborative Governance Regimes

Pencapaian tujuan bersama telah menunjukkan kemajuan fisik yang nyata dengan terbangunnya integrasi Portal DataGo yang memuat metadata terstruktur, sehingga memudahkan pemangku kepentingan dalam memperoleh referensi pembangunan. Manfaat ini dirasakan langsung oleh pengguna data dari kalangan akademisi (mahasiswi Universitas Negeri Tidar), seperti Nova Vitriana Azahra yang mengungkapkan bahwa portal tersebut sangat efisien untuk membantu penyusunan tugas dan riset akademik dalam satu platform. Kualitas pencapaian ini dinilai belum maksimal karena data sektoral yang disajikan belum sepenuhnya lengkap, konsisten, dan mutakhir.

Adaptasi terhadap perubahan sistem dan teknologi di Kota Magelang diupayakan secara berkala melalui bimbingan teknis, sosialisasi, serta rapat koordinasi penguatan keterbukaan informasi. Bentuk komitmen kepala daerah tampak pada pengarahan Wali Kota Magelang pada 15 Desember 2025 mengenai optimalisasi tiga platform utama daerah, yaitu DataGO, Geoportal, dan Portal PPID Kota Magelang. Cepatnya perubahan sistem digital ini sering kali berbenturan dengan rendahnya kapasitas adaptasi SDM di tingkat pelaksana yang cenderung resisten dan terbiasa dengan pola kerja manual lama. Pengguna data seperti Cahya Kusuma Alfiana juga menyoroti kelemahan sistem Portal DataGo yang masih bersifat satu arah tanpa dilengkapi fitur interaktif umpan balik (*feedback*), sehingga publik tidak memiliki sarana untuk melaporkan kesalahan data atau mengajukan kebutuhan dataset secara langsung.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang memberikan kontribusi signifikan dalam memodernisasi sektor publik menuju tata kelola berbasis digital. Penulis menemukan temuan penting bahwa keberhasilan pembentukan rezim tata kelola data ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kolaboratif, tingkat kepercayaan, serta komitmen kolektif dari seluruh unit organisasi perangkat daerah pelaksana.

Sama halnya dengan temuan penelitian Setiyawan, Yusrina, dan Mubarokah (2025), implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah masih dihadapkan pada hambatan klasik berupa lemahnya koordinasi antaraktor, adanya ego sektoral kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas teknis dari aparat pengelola data. Temuan ini memperkuat temuan penelitian Saepudin et al. (2025) karena menegaskan bahwa fragmentasi data dan disparitas kualitas informasi antar instansi berakar dari belum seragamnya pemahaman terhadap standar data dan kompetensi SDM statistik sektoral di level daerah.

Penyelenggaraan kebijakan di Kota Magelang sebagai pemerintah daerah skala menengah membuktikan hal yang berbeda dengan temuan Ahad dan Barsei (2023) yang menyoroti bahwa kesuksesan digitalisasi pemerintahan (SPBE) dapat diakselerasi secara linier melalui komitmen pimpinan dan penyediaan infrastruktur TIK. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan portal digital (DataGo) yang canggih dan dukungan regulasi lokal yang lengkap (Perda 15/2018) tidak serta-merta mengeliminasi ketimpangan ketersediaan data secara otomatis. Hambatan utama di Kota Magelang justru bergeser pada faktor non-struktural, yaitu ketidaksiapan kapasitas adaptasi SDM di tingkat bawah, dominasi komunikasi satu arah, serta belum terbangunnya motivasi bersama (*shared motivation*) secara menyeluruh yang terinternalisasi ke dalam budaya kerja birokrasi daerah.

Temuan ini memperjelas bahwa pemenuhan prinsip kesadaran dan kemandirian (*voluntarism and independence*) dalam mengelola data lintas sektor belum sepenuhnya merata akibat belum tersedianya insentif langsung yang mampu menumbuhkan motivasi internal para pengelola data di tingkat basis. Kebijakan tata kelola data yang digerakkan oleh pemerintah daerah idealnya mampu merangsang kontribusi aktif dari setiap produsen data layaknya prinsip gerakan sukarelawan dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Agustino (2019).

Penerapan ekosistem data yang kolaboratif dan terintegrasi secara jangka panjang diharapkan mampu menopang sistem pengambilan keputusan publik yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) secara akurat dan tepercaya. Ketersediaan rujukan data yang konsisten akan berdampak langsung pada efisiensi perencanaan pembangunan daerah serta penguatan transparansi informasi yang dapat diakses secara inklusif oleh masyarakat dan akademisi, serupa dengan hasil riset Khadijah dkk. (2016) mengenai kontribusi nyata komunitas informasi dalam mendukung kebutuhan analisis yang mendalam.

Berikut adalah beberapa temuan penting yang diperoleh dari analisis mendalam mengenai penerapan *collaborative governance* pada kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang:

a. Integrasi Portal Data Digital: Portal DataGo berhasil dibangun sebagai sarana tunggal integrasi data sektoral pemerintah daerah, meskipun tingkat keterisiannya masih perlu dilengkapi;
b. Hambatan Ego Sektoral: Ego sektoral kelembagaan masih menjadi kendala utama yang memicu fragmentasi dan ketidakseragaman publikasi data antarinstansi;
c. Defisit Kapasitas Teknis: Keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia di bidang statistik serta pengolahan metadata memperlambat proses pembaruan data;
d. Komunikasi Satu Arah: Pelaksanaan Forum Satu Data sebagai ruang keterlibatan berprinsip masih didominasi oleh wali data sehingga belum mencerminkan dialog deliberatif dua arah yang seimbang;
e. Tekanan Insentif Administratif: Motivasi keterlibatan aktor pelaksana sejauh ini masih digerakkan oleh tuntutan penilaian kinerja formal seperti Indeks SPBE kota;
f. Kebutuhan Akses Akademik: Pengguna data dari kalangan akademisi merasakan manfaat efisiensi waktu dalam mencari data awal, tetapi membutuhkan konsistensi pembaruan data secara berkala.

Secara keseluruhan, penerapan *collaborative governance* dalam kebijakan Satu Data Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun fondasi tata kelola data pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis mengidentifikasi beberapa faktor kontekstual yang menjadi penentu dinamika kolaborasi ini di lapangan. Faktor pendukung utama meliputi adanya landasan hukum yang kuat dari pusat hingga daerah, peran aktif Diskominsta sebagai fasilitator infrastruktur Portal DataGo, pembinaan teknis metodologi statistik oleh BPS, serta meningkatnya tuntutan sosial publik terhadap transparansi data pemerintah.

Faktor penghambat yang signifikan di lapangan terdiri dari kuatnya ego sektoral birokrasi, minimnya insentif langsung bagi para petugas admin data, dan keterbatasan kritis pada jumlah serta kompetensi teknis SDM pengelola data sektoral di masing-masing OPD. Dinamika internal birokrasi seperti kebijakan rotasi jabatan pegawai dan restrukturisasi organisasi juga menjadi kendala kultural yang menghambat konsistensi input data, karena menyebabkan hilangnya kesinambungan program kerja dan memaksa proses adaptasi teknologi harus dimulai kembali dari awal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah telah terbentuk namun belum berjalan secara optimal. Kelemahan utama dalam tata kelola kolaboratif ini terletak pada aspek *principled engagement* yang belum intensif serta *capacity for joint action* yang masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis di tingkat pelaksana. Keberadaan regulasi formal (Perda 15/2018) dan infrastruktur Portal DataGo sejauh ini baru menopang administrasi sistem, sementara keterbukaan dan integrasi data sektoral riil di lapangan masih dihambat oleh resistensi ego sektoral antarinstansi. Guna mengoptimalkan tata kelola data daerah tersebut, Pemerintah Kota Magelang disarankan untuk melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi lintas aktor, serta membangun komitmen kolektif. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

(Diskominsta) perlu diperkuat kewenangan koordinatifnya selaku wali data untuk memastikan kepatuhan penuh dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pemenuhan standar data dan metadata sektoral. Pemerintah daerah juga seyogianya mendorong transformasi budaya kerja birokrasi menuju *data-driven governance* melalui program pendampingan statistik teknis yang berkelanjutan serta menetapkan mekanisme evaluasi pengelolaan data berbasis capaian kinerja.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada lingkup lokus penelitian yang hanya berfokus pada satu daerah otonom, yaitu Pemerintah Kota Magelang, sebagai model studi kasus kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data lapangan juga memiliki keterbatasan ruang dan waktu tertentu, sehingga dinamika perkembangan teknologi informasi dan perubahan kebijakan digital yang terjadi pasca-periode penelitian belum dapat terekam secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan analisis mengenai rezim tata kelola kolaboratif data pada tingkat daerah, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan memperluas cakupan wilayah pengamatan. Studi masa depan dapat diarahkan untuk membandingkan pola implementasi Satu Data Indonesia di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah guna merumuskan model kolaborasi multi-aktor yang lebih adaptif, inklusif, dan komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Magelang, khususnya jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang telah memberikan kesempatan, bantuan data, dan dukungan penuh kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abraham, R., Schneider, J., & vom Brocke, J. (2019). Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. *International Journal of Information Management*, *49*, 424–438. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008

Adinegoro, B., Fuad, M., Ruhuputy, A., Pambudi, I., & Arrahman, T. (2025). KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA : SEBUAH ANTITESIS, *16*, 1–11. https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/21869/10544

Ahad, M. P. Y., & Barsei, A. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia: COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED GOVERNANCE SYSTEMS: BEST PRACTICES FROM LOCAL GOVERNMENTS IN EASTERN IN. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *13*(01 SE-Articles), 52–74. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Ardieansyah, Asmungi, & Latip. (2023). *Metode Penelitian Sosial* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish.

Budijaya, M. I., & Situmeang, M. (2025). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi di Era Society 5.0. *All Fields of Science J-LAS*, *5*(2), 1–13. https://doi.org/10.58939/afosj-las.v5i2.787

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the Productivity of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance & Management Review*, *38*(4), 717–747. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016

Hendiyani, M. F., & Fansuri, H. (2024). Evaluasi Kebijakan Clearance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik , Studi Pada : Kementerian dan Lembaga. https://doi.org/10.33701/jmb.v6i2.4940

Hidayah, E. S., & Almadani, M. (2022). Analisis Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *4*(2), 49–67. https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i2.2680

Husna, S. (2025). Membangun Fondasi Digital : Peran Data Governance dalam Strategi Transformasi yang Berkelanjutan, *2*(3), 207–216. https://doi.org/10.61722/jmia.v2i3.4711

Komarudin, D., Mu'minah, S., Praja, S. J., Setiawan, S., & Ruhana, F. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai Instrumen Inovasi Pemerintah Daerah dalam Menjamin Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, *8*(2 SE-), 575–583. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i2.1092

Ramadhan, A. F., Tajudeen, F. P., & Jaafar, N. I. (2024). The Influence Factors of Data Governance Implementation: Study in Indonesian Public University. *Procedia Computer Science*, *234*, 1204–1211. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.03.116

Saepudin, E. A., Solehatunnisa, F., Lestari, N. A., Gunawan, R. A. V., & Fadilah, S. (2025). Implementasi Satu Data Indonesia dalam Mendukung Transparansi dan Akses Data Publik. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(3 SE-Articles), 442–452. https://doi.org/10.63822/pydk5v51

Setiyawan, L. S., Yusrina, Mubarokah, S. A., & Asropi. (2025). Analysis of Collaborative Governance in the Implementation of Satu Data Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, *11*(1), 81–92. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2025.011.01.8

Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.

Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, *19*, 13–26. https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361

Wasistiono, S., & Rohmadin, S. (2023). *Teori Organisasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yulianto, D. (2025). Pola Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Kota Yogyakarta (Studi Kasus Program Gandeng Gendong). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(2 SE-Articles), 486–503. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18304

Zaenuddin, M., & Tibrani, T. (2026). Exploring policy innovation performance through transformational leadership and collaborative governance flexibility in Batam, Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *12*(2), 100798. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2026.100798